

# Luas Lingkup Kebijakan Publik

---

---

# Luasnya Dimensi Kebijakan Publik

- Dari berbagai definisi, kebijakan publik memiliki lingkup yang sangat luas.
- Mengikuti definisi Thomas Dye, misalnya, hampir semua yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah termasuk dalam definisi sebagai kebijakan.

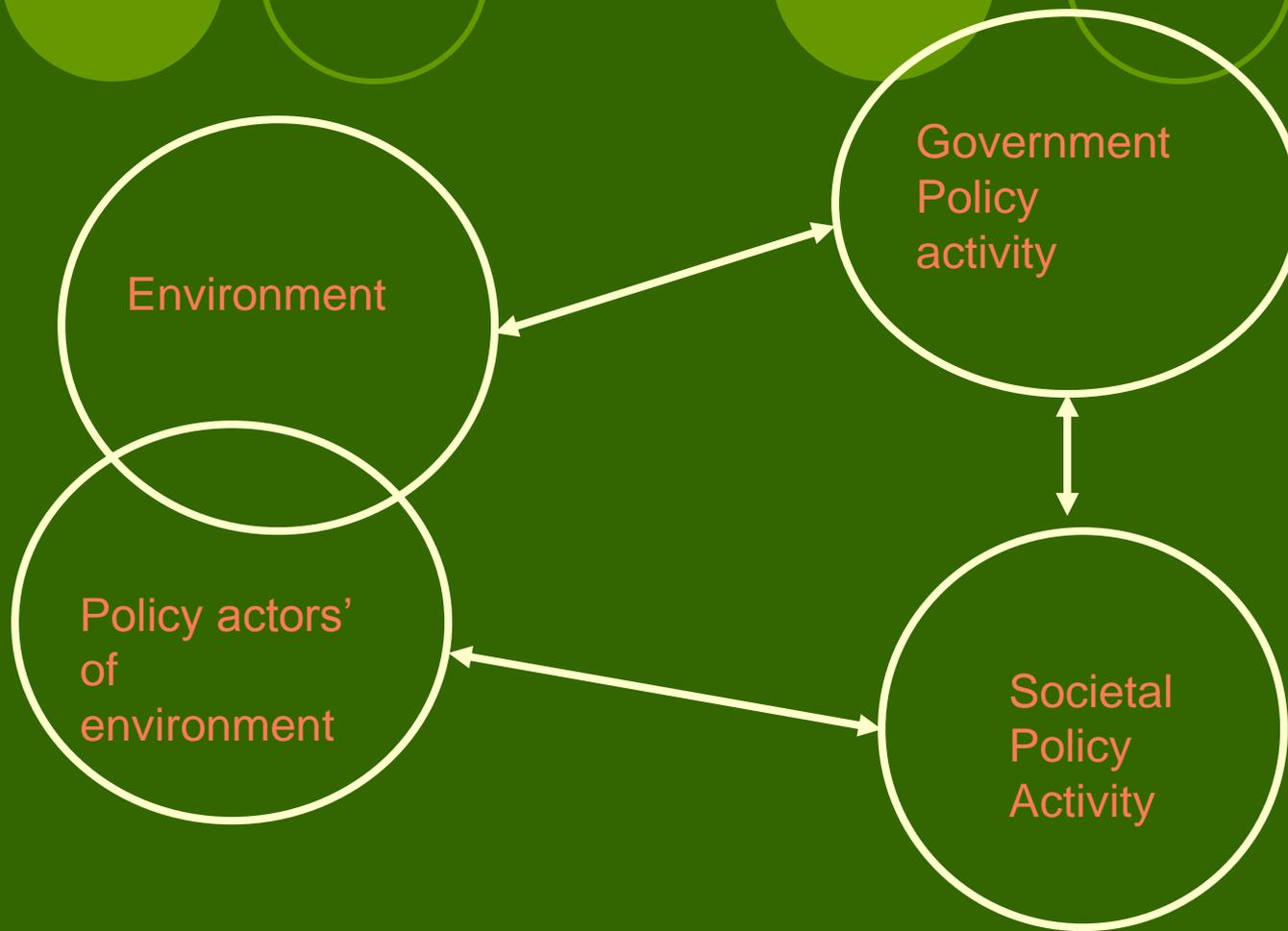
# Mengapa Perlu Ada Pembatasan Luas Lingkup?

- Jika kebijakan publik mencakup semua aspek maka menjadi sangat sulit bagi analis kebijakan untuk membuat fokus pada level mana, atau kebijakan yang mana yang menjadi fokus bahasannya.
- Oleh karena itu untuk keperluan analisis kebijakan maka analis perlu membuat suatu pendekatan untuk dapat memetakan luas lingkup suatu kebijakan

# Bagaimana Cara Membatasi Ruang Lingkup kebijakan

- Tidak ada cara tunggal untuk membuat batasan atau klasifikasi suatu kebijakan.
- Salah satu cara yang dapat dipakai adalah melihat kebijakan dari hierarkinya (secara vertikal) dan berdasarkan substansi yang dibicarakannya (horisontal).

# Model Umum Perumusan Kebijakan



## Aktor-aktor dalam perumusan dan implementasi kebijakan

Level	Executive officials and organizations	Legislative Official and Organizations	Bureaucratic Officials and Organizations	Nongovernmental Individuals and Organizations	Judicials and Organization
Federal	<ul style="list-style-type: none"> <li>● President</li> <li>● Executive Office of the president</li> <li>● Staff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Congress</li> <li>● Congressional staff and support agencies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Department and agency heads</li> <li>● Staff-civil servants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Corporations</li> <li>● Labour Union</li> <li>● Interest group</li> <li>● Advisory body</li> <li>● Media (with national focus and impact)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Federal judges</li> <li>● Law Clerks</li> <li>● Marshal</li> <li>● Master,expert</li> <li>● Federal attorneys</li> </ul>
State	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Governor</li> <li>● Governor's staff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● State legislature</li> <li>● Staff and Support agencies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Department and agency heads</li> <li>● Staff-civil servants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Same above (with state focus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● State judges</li> <li>● Law clerks</li> <li>● Miscellaneous state judicial official</li> </ul>
Local	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mayor</li> <li>● Country commisioners</li> <li>● Other local elected executives</li> <li>● Staff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● City councils, board of commisioners, other local elected officials</li> <li>● staff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Department and agency heads</li> <li>● Staff-civil servants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Same above (with local focus)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Local Judges</li> <li>● Law Clerk</li> <li>● Misslaneous local judicial official</li> </ul>

# Luas Lingkup Kebijakan Publik di Indonesia Secara Vertikal

- Hierarki sistem perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- UUD ini telah diamandemen sebanyak 4 kali sejak reformasi tahun 1998 (terakhir pada bulan Nopember 2001 dan Agustus 2002).
- Beberapa aspek penting yang diamandemen
  - Membentuk KPU
  - Meneguhkan prinsip2 otda
  - Membentuk sebuah bank sentral yang independent
  - Memasukkan ketentuan HAM sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

## Luas Lingkup Vertikal...(2)

- **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat** (berdasarkan Tap MPR No III tahun 2000) Tap MPR masih menduduki hierarki tertinggi dalam sistem perundang-undangan nasional. Namun dengan dilakukannya amandemen ke empat UUD 45 ketentuan ini perlu dirubah karena MPR telah kehilangan statusnya sebagai lembaga tertinggi negara. Konsekuensinya Tap MPR perlu dirubah formatnya menjadi UU.
- Dalam UU No. 10/2004 (pasal 7) Tap MPR sudah tidak masuk lagi dalam hirarki sistem perundang-undangan di Indonesia

# Luas...(3)

## ● Undang-Undang

- UU dibuat berdasarkan kesepakatan presiden dan DPR di mana salah satu pihak bisa menjadi pengusul
- UU dibagi menjadi tiga jenis: Pidana, Perdata, Tata Negara
- Untuk dapat dilaksanakan suatu UU memerlukan perangkat aturan yang lebih operasional

# Luas...(4)

- **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.**
  - Dalam situasi gawat presiden dapat mengeluarkan pp yang punya fungsi atau lingkup yang sama dengan UU
  - PP harus dijadikan UU atau ditolak dalam sidang DPR berikutnya

# Luas...(5)

- **Peraturan Pemerintah:** Merupakan perangkat hukum sekunder yang merupakan peraturan pelaksanaan sebuah UU
- **Keputusan Presiden:** Kedudukannya lebih rendah daripada peraturan pemerintah yang merupakan perangkat pelaksanaan UU dan program-program pemerintah
- **Peraturan Daerah:** Memiliki kedudukan paling rendah dalam hirarki sistem perundang2an di Indonesia.
  - Berdasarkan Pasal 7 UU No. 10/2004 Perda meliputi: Perda provinsi, Perda kabupaten/kota, Peraturan Desa.

# Luas Lingkup Secara Horizontal

- Secara horizontal luas lingkup kebijakan publik dibedakan berdasarkan substansi kebijakan
- Dalam sistem pemerintahan, substansi ini ditangani oleh Departemen atau Dinas pada level Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## Horisontal...(2)

- Berdasarkan departemenisasinya, maka luas lingkup kebijakan publik di Indonesia adalah:

## Horisontal...(3)

- Untuk kewenangan dinas yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dalam PP No. 8/2003
  - Provinsi sebanyak-banyaknya 10 dinas dan khusus DKI sebanyak-banyaknya 14 dinas.
  - Kabupaten/kota sebanyak-banyaknya 14 dinas

# DISKUSI MAHASISWA (1)

- Diskusikan persoalan berikut dalam waktu 15 menit.
- Akan dipanggil 3 kelompok untuk mendiskusikan hal tersebut.

# DISKUSI MAHASISWA (2)

- Sebutkan 3 (tiga) permasalahan ekonomi di level daerah (provinsi dan kabupaten) dan level nasional.
- Sebutkan siapa pembuat kebijakan (kementerian/dinas) yang menangani masalah tersebut dan berikan alasannya.

# TUGAS 1

- Berikan studi kasus kebijakan public terkait masalah ekonomi yang diambil oleh dinas-dinas (minimal 2 dinas) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota Jawa Timur.
- Kemudian berikan perbandingan bagaimana kebijakan public yang diambil dari 2 dinas yang anda cari tersebut.

# Tugas 1 (lanjut)

- Tugas diketik pada kertas A4
- Font arial 11, margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas, 3 cm, bawah 3 cm
- Spasi 1,5
- Dikumpulkan pada saat UTS pada map plastic warna kuning
- Pada kertas A4 bagian pojok kanan atas diketik TUGAS 1-AKP
- Map bagian depan dikasih nama dan nim, mata kuliah, dan program studi.